

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pengkategorian tindakan menolak kebijakan pemerintah ke dalam pelanggaran ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah adanya tindakan menolak kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat yang berupa resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Mengacu pada permasalahan tersebut, terdapat peraturan yang kontradiksi atau bertolak belakang, yakni ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dengan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam hal ini, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mengatur mengenai kewajiban yang dimiliki masyarakat untuk menciptakan keserasian, keselarasan, keseimbangan

salah satunya dalam hal kesehatan. Sedangkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur mengenai hak yang dimiliki masyarakat untuk menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya masing-masing.

2. Perlindungan hukum terhadap penduduk yang menolak kebijakan pemerintah dengan alasan memiliki penyakit komorbiditas atau penyakit penyerta serta adanya hak untuk menentukan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah ditemukannya kekosongan hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam prakteknya terdapat upaya perlindungan hukum, akan tetapi belum terdapat hukum atau kebijakan pemerintah yang secara tertulis dan eksplisit mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tindakan menolak kebijakan pemerintah yang dapat digambarkan dengan adanya fenomena tindakan menolak kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aturan mengenai protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah mengenai program vaksinasi Covid-19. Artinya, terdapat kekosongan hukum terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat yang menolak kebijakan terkait pandemi dengan alasan memiliki penyakit komorbiditas serta adanya hak untuk menentukan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat saran kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian ini:

1. Disarankan kepada pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan untuk melakukan amandemen atau perubahan secara resmi yang bertujuan untuk memperbaiki muatan pasal dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mana antara dua kebijakan pemerintah tersebut terdapat ketentuan yang bertolak belakang, sehingga pemerintah harus membentuk kebijakan yang secara eksplisit mengatur dan memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam hal mengatasi atau menanggulangi pandemi. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
2. Disarankan kepada lembaga legislatif untuk membuat kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan tindakan menolak kebijakan pemerintah terkait pandemi dengan alasan memiliki penyakit komorbiditas, hal tersebut berkaitan

dengan ketentuan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum,

3. Disarankan untuk lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden, untuk ikut serta dalam melakukan pengesahan kebijakan apabila di masa yang akan datang dibuat kebijakan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan tindakan menolak kebijakan pemerintah terkait pandemi dengan alasan memiliki penyakit komorbiditas yang berhubungan dengan muatan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Disarankan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam hal pembentukan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dari suatu kebijakan pemerintah terkait penanganan atau penanggulangan pandemi. Hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pemerintah, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Latief, Ahmad Al Yakin, Herlina Ahmad, 2019, *Pendidikan kewarganegaraan*, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia
- Faturochman dan Agus Dwiyanto, 2000, *Reorientasi Kebijakan Kependudukan*, Yogyakarta: Aditya Media
- Koentjoroningrat, 2000, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: CV Mandar Maju
- Manshuri dan Rao, 2011, *Participatory Development Reconsidered*
- Notoadmodjo S, 2005, *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UII Press
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Slamet, Y, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Sundariningrum, *Klasifikasi Partisipasi*, Jakarta: Grasindo
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan Jakarta Timur*: Sinar Grafika
- Wisner and Kelman, 2012, *Framing disaster: theories and stories seeking to understand Hazards, vulnerability and risk*
- W. Riawan Tjandra & amp; Kresno Budi Sudarsono, 2009 *Legislative Drafting: Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya

JURNAL

Andre Kawulur, Salmin Dengo, Sonny.P.I.Rompas, Peranan BKKBN Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan) *Jurnal Administrasi Publik* (2015) Muhyar Nugraha, Latifah Ratnawaty, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal YUSTISI* (Vol. 3 No. 1 Maret (2016))

Ahmad Suhendi, Peranan Tokoh Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Informasi* (Vol. 18 No. 02 (2013))

Bunga Agustina, Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Wawasan Hukum* (Vol. 32 No. 01 (2015))

Cindy Anggraeny, Inovasi pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Puskesmas Jagir Kota Surabaya *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* (Vol. 01 No. 01 (2013))

Darmin Tuwu, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, *Journal Publicuho* (Vol. 03 No. 02 (2020))

Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, Konseptualisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Bela Negara, *Jurnal Pancasila dan Bela Negara* (Vo. 01 No. 01 (Februari 2021))

Dita Cipta Afrilian Grace Natasia, Sugiharto, Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Menolak Program Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'* (Vol. 12 No. 2 (2022))

Ernawati Purwaningsih, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, *Jurnal Jantra* (Vol. III No. 06 (2008))

Eny Rochaida, Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Ekonomi* (Vol. 18 No. 01 (2016))

Fahdian Rahmandani, Samsuri, Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara Dalam Membentuk Masyarakat Sipil, *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* (Vol. 04 No. 01 (Juni 2019))

- Heny Purwandiyah, Impelentasi Program Keluarga Berencana Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera (Studi di Kec. Telen Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur), *Jurnal Paradigma* (Vol. 02 No. 01 (April 2013))
- Kadek Wisnu Segara Karya, I Made Suwidnya, Beny Surya Wijaya, Hubungan Penyakit Komorbiditas terhadap Derajat Klinis Covid-19, *Intisari Sains Medis 2021* (Vol. 12 No. 02 (2021))
- Kirana Eka Putri, Kris Wiranti, Yosef Syukurman Ziliwu, Maria Elvita, Debora Yulia Frare, Rotua Sari Purdani, Susanti Niman, Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi Covid-19, *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Pesatuan Perawat Nasional Indonesia* (vol. 9, Agustus (2021))
- Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, Ibnu Affan, *Jurnal Ilmiah Mertada*, (Vol 3, Mei (2021))
- Siti Nurhalimah, Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* (Vol. 7 No. 6 (2020))
- Sulsalman Moita, Sarmadan, Syaifuddin S. Kasim, Bahtiar, Penyuluhan Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Abdidias* (Vol. 1 No. 06 (2020))
- Suprayoga Hadi, Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana, *The Indonesian Journal of Development Planning* (Vol. IV No. 2 (2020))
- Muhammad Nadif Mahardika, Anita Trisiana, Awal Widyastuti, Jihan Sephiani Juhaena, Ristiara Mea Amanda Kirani, Strategi Pemerintah dan Kepatuhan Masyarakat dalam Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis Semangat Gotong Royong, *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol IX No. 01 (2020))
- I Made Dharmadi, Partisipasi Masyarakat Pada Pelayanan Kesehatan Terstruktur dan Paripurna, *Jurnal PIRAMIDA* (Vol. V No. 01 (Juli 2009))
- I Nyoman Teguh Dharma Jaya, I Wayan Wira Udytama, Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Terhadap Keluarga Berencana, *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati* (Vol. 01 No. 01 (2021))

- Jeannifer, Sanksi Pidana Terhadap Penolak Vaksin Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, sosial dan Keagamaan* (Vol. 19 No. 01 (2021))
- Lukmanul Hakim, S.Ag, M.Si. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, *Jurnal Politikom Indonesiana* (Vol. 02 No. 02 (Tahun 2017))
- Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan, *Jurnal Aspirasi* (Vol. 06 No. 02 (Desember 2015))
- Jorildo SIKome, Ronny Gosal, Frans SIngkoh, Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan di Desa Kisihang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Sitaro, *Jurnal Eksekutif* (Vol. 01 no. 01 (2017))
- Lukmanul Hakim, S.Ag, M.Si. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, *Jurnal Politikom Indonesiana* (Vol. 02 No. 02 (Tahun 2017))
- Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan, *Journal Inicio Legis* (Vol. 01 No. 01 (2020))
- Muhammad Ansori Lubis, Ria Sinta Dhevi, Muhammad Yasid, Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam mewujudkan Good Governance, *Jurnal Darma Agung* (Vol. 28 No. 02 (2020))
- Nasrullah Hidayat, Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia, *Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 01 No. 02 (Tahun 2013))
- Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia, *Jurnal Volkgeist* (Vol. 01 No. 01 (2018))
- Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (Vol. 08 No. 03 (2021))
- Reza Novriani, Hasrul, Maria Montessori, Suryanef Resistensi Masyarakat terhadap Kebijakan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 di nagari Lubuk Malako, *Journal of Civic Education* (Vol. 05 No. 02 (2022))
- Rizka Agustina, Grace Sharon, Levina Yustitiationingtyas, Hartono Widodo Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat,

Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia, *Indonesia Law Reform Journal* (Vol. 01 No. 03 (2021))

Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, *Jurnal Geografi* (Vol. 09 No. 01 (2017))

Rosmala Dewi, Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakanm Publik, *Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 05 No. 01 (2017))

Saut P. Panjaitan, Jaminan Perlindungan Konstitusional Hak Tiap Orang Untuk Memperoleh Informasi dan Berkomunikasi, *Jurnal Simbur Cahaya* (Vol. XV No. 42 Mei (2010))

Sema Ardianto, Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Impementasi Peraturan Daerah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* (Vol. 13. No. 1 Maret (Tahun 2018))

Septi Yunita, Dinie Anggraeni Dewi, Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang, *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Vol. 01 No. 12 (Desember 2021))

Septiofera Eresus Prabowo, Djamhur Hamid, Arik Prasetya, Analilis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* (Vol. 33 No. 02 (April 2016))

Siti Ramdana, Aji Ratna Kusuma, Fajar Apriani, Impelentasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga Pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda, *Jurnal Administrasi Negara* (Vol. 06 No. 03 (2018))

Sulsalman Moita, Sarmadan, Syaifuddin S. Kasim, Bahtiar, Penyuluhan Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Abdidas* (Vol. 1 No. 06 (2020))

Suprayoga Hadi, Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana, *The Indonesian Journal of Development Planning* (Vol. IV No. 2 (2020))

ATURAN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

LAMAN INTERNET

Alodokter, Penyakit Komorbid dan Kaitannya dengan COVID-19 <https://www.alodokter.com/penyakit-komorbid-dan-kaitannya-dengan-covid-19> diakses pada 16 Desember 2021

Alodokter, *Pengertian Malaria* <https://www.alodokter.com/malaria> diakses pada 26 Oktober 2022

Detik.com, Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli <https://www.detik.com/> diakses pada 01 Desember 2022

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi/> diakses pada 30 Oktober 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Lombok Timur, Pentingnya Program Keluarga Berencana untuk Kehidupan Lebih Baik <https://lomboktimurkab.go.id>, diakses pada 04 Desember 2022

Dw.com, *Tiga Alasan Utama Warga RI Tolak Vaksin Covid-19* <https://www.dw.com/> diakses pada 26 April 2023

jdih.sukoharjokab.go.id, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya <https://jdih.sukoharjokab.go.id> diakses pada 22 Mei 2023

JSC, Alasan Kelompok Masyarakat Ini Tak Boleh Divaksinasi Covid-19 <https://corona.jakarta.go.id/en/artikel/alasan-kelompok-masyarakat-ini-tak-boleh-divaksinasi-covid-19> diakses pada 16 Desember 2021.

Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Indonesia Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 <https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-indonesia-sambut-baik-vaksinasi-covid-19> diakses pada 30 Oktober 2021

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), Penanganan Pandemi Covid-19 perlu Sinergi dan Gotong Royong Semua Pihak <https://www.kemendikbud.go.id/penanganan-pandemi-covid-19-perlu-sinergi-dan-gotong-royong-semua-pihak> diakses pada 30 Oktober 2021

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45 <https://www.mkri.id/> diakses pada 01 Desember 2022

Pusdiklat.kemdikbud.go.id, *PP 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease* <https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/pp-21-tahun-2020-Tentang-pembatasan-sosial-berskala-besar-dalam-rangka-percepatan-penanganan-corona-virus-disease-covid-19/> diakses pada 26 Maret 2023

RSUD Dr. R Soetijono Blora, *Mengenal Cacar Monyet (Monkeypox)* <https://rsudblora.blorakab.go.id> diakses pada 26 Oktober 2022

Universitas Al Azhar Indonesia, *Pakar: Sesuai UU 6/2018, menolak Vaksin Tidak Dapat Dipidana* <https://uai.ac.id/> diakses pada 04 Juni 2023

WHO, *WHO Coronavirus Disease (Covid-19)* <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>